



Pengaruh Pandemi COVID-19 di Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Anomie di Indonesia

Adriani Galry Adoniram Tobondo

Universitas Kristen Tentena

donitobondo@gmail.com

Abstrak:

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembatasan mobilitas, penutupan tempat-tempat umum, serta penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Namun, pandemi COVID-19 juga dipandang sebagai momentum untuk melakukan diversifikasi produk ekspor dan impor serta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan dan jasa. Melalui artikel ilmiah ini yang disusun dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, bertujuan untuk memahami peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial di sektor perdagangan dan jasa dalam hubungannya dengan pertumbuhan anomie di Indonesia.

Kata kunci: *Sektor Informal, Kemiskinan dan Kesenjangan, Anomie*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembatasan mobilitas, penutupan tempat-tempat umum, serta penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Indonesia, memberlakukan *lockdown* terdesentralisasi dan bertahap, serta tidak pernah mencapai tingkat ketat seperti negara lain ([bisnis.com](#)). Langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan *lockdown* diserahkan melalui propinsi dan kabupaten, kemudian beberapa propinsi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk respon persoalan pandemik COVID-19 yang berimbang pada kehidupan sosial dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Pemberlakuan PSBB disusul dengan penutupan tempat-tempat umum yang dilakukan pemerintah Indonesia seperti pusat perbelanjaan, restoran dan tempat hiburan.

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada daya beli konsumen yang mengalami penurunan akibat banyak warga kehilangan pekerjaan, berkurangnya jam kerja dan perubahan perilaku konsumen. Penurunan daya beli konsumen berdampak negatif terhadap sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi ini, karena mengalami gangguan pada rantai pasok, permintaan, biaya logistik, dan kerjasama internasional. Sektor ini juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, karena merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi banyak orang.

Disisi lain, pandemi COVID-19 dipandang sebagai momentum untuk melakukan diversifikasi produk ekspor dan impor misalnya memanfaatkan potensi pasar baru atau



alternatif, momentum untuk mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan dan jasa seperti pengembangan *e-commerce*, *fintech*, logistik online. Dilain sisi, Indonesia harus mengalami banyak persoalan bersumber dari tingkat keragaman sosial yang tinggi dari jumlah penduduk 270 juta jiwa, tingkat konsumsi dan ketergantungan yang tinggi untuk beberapa komoditas strategis seperti bahan bakar minyak, bahan baku industri, bahan baku pangan, dan alat-alat kesehatan, struktur ekspor yang rapuh karena masih didominasi oleh komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global, tingkat biaya logistik yang tinggi akibat infrastruktur transportasi yang belum memadai, regulasi yang berbelit-belit, praktik monopoli dan oligopoli di beberapa sektor, daya saing yang rendah akibat rendahnya produktivitas, inovasi, kualitas produk, dan standar mutu.

Dari banyak problematika yang muncul sebagai dampak pandemi COVID-19 pada peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial di sektor perdagangan dan jasa, tidak disadari bahwa hal tersebut juga berimplikasi pada pertumbuhan tingkat anomie di Indonesia. Melalui artikel ilmiah ini yang disusun dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur bersumber dari data-data yang relevan dan terpercaya seperti media pemberitaan, laporan resmi, buku dan lainnya, bertujuan untuk memahami peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial di sektor perdagangan dan jasa dalam hubungannya dengan pertumbuhan anomie di Indonesia.

Peningkatan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Sektor Perdagangan dan Jasa

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian dunia dengan sangat signifikan. Kondisi tahun 2020 hingga tahun 2021 produk domestik bruto (PDB) dunia turun sebesar 3,4 persen ([statista.com](https://www.statista.com)). Untuk memberikan gambaran, PDB global mencapai 84,54 triliun dolar AS pada tahun 2020, yang berarti penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,4 persen menghasilkan lebih dari dua triliun dolar AS dari output ekonomi yang hilang. Namun, ekonomi global pulih dengan cepat dari guncangan awal dan mencapai tingkat pertumbuhan positif lagi pada tahun 2021. Pada tahun itu, PDB global mencapai 92,3 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Namun, perang Rusia di Ukraina sejak Februari 2022 dan dampaknya terhadap ekonomi dunia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

IMF memperkirakan bahwa ekonomi global menyusut sebesar 4,4% pada tahun 2020. Organisasi tersebut menggambarkan penurunan itu sebagai yang terburuk sejak Depresi Besar pada tahun 1930-an ([bbc.com](https://www.bbc.com)). Satu-satunya ekonomi utama yang tumbuh pada tahun 2020 adalah China. Negara Cina mencatat pertumbuhan sebesar 2,3%. Namun, IMF memprediksi pertumbuhan global sebesar 5,2% pada tahun 2021.

Menurut laporan Bank Dunia, ekonomi Indonesia terus pulih pada tahun 2021 meskipun melambat karena gelombang varian Delta COVID-19 pertengahan tahun ([worldbank.org](https://www.worldbank.org)). Ekonomi diperkirakan telah berkembang sebesar 3,7 persen tahun ini dan diperkirakan akan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2022. Proyeksi ini mengasumsikan bahwa Indonesia akan menghindari lonjakan COVID-19 yang parah lainnya, mencapai cakupan vaksin 70 persen pada tahun 2022 di sebagian besar provinsi, dan mempertahankan kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif. Ini juga



mengasumsikan bahwa pertumbuhan perdagangan global dan harga komoditas akan moderat.

Namun, risiko penurunan terhadap prospek tetap tinggi di tengah ketidakpastian tentang pandemi, kondisi keuangan global, dan efek bekas dari krisis (iseas.edu.sg). Untuk mempertahankan momentum ekonomi dan mencegah efek pandemi meninggalkan bekas ekonomi dan sosial yang langgeng, pihak berwenang perlu fokus pada respons kebijakan yang memperkuat investasi, mempercepat akumulasi modal manusia, dan meningkatkan produktivitas. Tantangan untuk ini termasuk menahan pandemi dengan mempercepat peluncuran vaksin di daerah tertinggal dan mempercepat pengujian, pelacakan, dan perawatan; serta mempertahankan sikap kebijakan moneter dan keuangan akomodatif sambil mempersiapkan untuk menyesuaikan kebijakan seiring berkembangnya tekanan keuangan global dan domestik.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat dari 26,42 juta orang pada tahun 2020 menjadi 27,55 juta orang pada tahun 2021. Peningkatan kemiskinan ini didorong oleh pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap sektor informal, di mana sebagian besar penduduk miskin bekerja. Sektor informal seperti perdagangan dan jasa merupakan sektor informal terbesar dengan jumlah tenaga kerja mencapai 40% dari total tenaga kerja informal lainnya di Indonesia. Artinya, pandemi COVID-19 dinilai signifikan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di sektor perdagangan dan jasa, karena berpengaruh besar pada pelambatan ekonomi. Perlu diketahui bahwa pelambatan ekonomi di Indonesia bukan hanya disebabkan pengaruh masalah global seperti pandemi COVID-19, tetapi banyak aspek pengaruh pada pelambatan ekonomi seperti ketegangan politik ekonomi Amerika Serikat dan Cina, penurunan harga komoditas, perang Rusia dan Ukraina. Pandemi COVID-19 dinilai memperlambat pemulihan kondisi sosial ekonomi terutama ketika Indonesia berada pada era endemic COVID-19 atau kemudian dikenal berada pada new normal COVID-19, pelambatan ekonomi semakin kontras dan dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya pekerjaan dan lapangan kerja, kemiskinan dan ketimpangan (kumparan.com).

Pendapatan masyarakat menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai -2,07%, yang merupakan kontraksi pertama sejak krisis moneter tahun 1998. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat juga turun dari Rp 60,53 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 56,42 juta pada tahun 2020.

Lapangan kerja masyarakat berkurang akibat adanya pembatasan kegiatan ekonomi untuk mencegah penyebaran Covid-19. BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang, atau meningkat sebesar 2,67 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga menurun dari 133,56 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 128,06 juta orang pada Agustus 2020.

Kemiskinan masyarakat meningkat akibat menurunnya pendapatan dan lapangan kerja. BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang, atau naik sebesar 2,76 juta orang dibandingkan dengan September 2019. Persentase penduduk miskin juga naik dari 9,22% menjadi 9,78%. Selain itu, garis



kemiskinan juga naik dari Rp 440.538 per kapita per bulan menjadi Rp 458.654 per kapita per bulan.

Ketimpangan masyarakat memburuk akibat adanya kesenjangan antara kelompok yang terdampak dan tidak terdampak oleh pelambatan ekonomi. BPS mengukur ketimpangan dengan menggunakan rasio gini, yang merupakan ukuran yang berkisar antara 0 (tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan paling tinggi). Rasio gini Indonesia pada September 2020 mencapai 0,382, yang merupakan kenaikan sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan September 2019.

Anomie sebagai Ketidakstabilan Sosial

Konsep anomie pertama kali diperkenalkan Emile Durkheim pada "The Division of Labour in Society" diterbitkan tahun 1893. Anomie adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidaksabilan sosial sebagai dampak dari tidak berlakunya standar dan nilai-nilai atau tidak tercapainya tujuan, dan atau tujuan yang tercapai tidak merata, sehingga suatu cita-cita atau harapan tidak dapat terkabul dengan baik. Ketidakstabilan sosial disebabkan oleh ketiadaan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa anomie menyebabkan perilaku menyimpang atau menjadi sumber dari tindakan kejahatan dan kriminal, karena individu-individu tidak merasa terikat atau diarahkan oleh aturan-aturan sosial yang ada.

Sebagai contoh, Durkheim mempelajari kasus-kasus bunuh diri di berbagai negara dan menemukan bahwa tingkat bunuh diri lebih tinggi di negara-negara yang mengalami perubahan sosial yang cepat dan radikal, seperti Prancis dan Jerman pada akhir abad ke-19. Durkheim menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah melemahkan ikatan sosial dan menghilangkan rasa keterlibatan individu dalam masyarakat, sehingga mereka merasa tidak memiliki tujuan atau arah hidup.

Contoh lain dari anomie adalah fenomena urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi dapat menimbulkan anomie karena individu-individu yang pindah ke kota harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya. Mereka mungkin kehilangan hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas yang memberikan dukungan sosial dan bimbingan moral. Mereka juga mungkin menghadapi kesulitan ekonomi, persaingan, atau diskriminasi dalam mencari pekerjaan, tempat tinggal, atau layanan publik. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri, harga diri, atau identitas sosial mereka, dan membuat mereka merasa terasing atau tidak berdaya.

Contoh lain lagi dari anomie adalah fenomena globalisasi, yaitu proses integrasi ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan antar negara dan wilayah. Globalisasi dapat menimbulkan anomie karena individu-individu harus menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat dan kompleks dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif. Mereka mungkin merasa tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, informasi, atau komunikasi yang terus berkembang. Mereka juga mungkin merasa tidak memiliki kontrol atau pengaruh atas keputusan-keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi, ketakutan, atau marah.

Durkheim membedakan empat jenis bunuh diri berdasarkan tingkat integrasi dan regulasi sosial, yaitu bunuh diri egois, altruistik, anomali, dan fatalistik. Bunuh diri anomali terjadi ketika terdapat perubahan mendadak atau krisis dalam masyarakat, seperti perang, revolusi, atau depresi ekonomi, yang mengganggu keseimbangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana-sarana yang sah untuk mencapainya. Individu-individu yang mengalami bunuh diri anomali merasa tidak memiliki tujuan atau harapan hidup, dan tidak menemukan makna atau kepuasan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Anomie dapat terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat dan mendasar, seperti industrialisasi dan urbanisasi. Giddens membahas anomie dalam konteks masyarakat modern. Menurut Giddens, masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang cepat dan mendasar. Perubahan ini dapat menyebabkan anomie, karena individu tidak lagi memiliki pedoman yang jelas untuk perilaku mereka. Anomie dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kejahatan, kenakalan remaja, dan penyakit mental atau masalah sosial serius lainnya. Demikian Giddens (1972) mengutip pemikiran Durkheim.

Robert K. Merton mengembangkan teori anomie Durkheim dalam *strain theory* (simplypsychology.org). Merton berpendapat bahwa anomie terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan-tujuan budaya dan sarana-sarana struktural dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Amerika, tujuan budaya yang dominan adalah mencapai kesuksesan ekonomi, tetapi sarana-sarana struktural yang tersedia bagi sebagian besar penduduk adalah terbatas atau tidak adil. Hal ini menimbulkan strain atau tekanan pada individu-individu untuk mencari cara-cara alternatif atau ilegal untuk mencapai tujuan-tujuan budaya tersebut.

Strain theory memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan fenomena kriminalitas dan penyimpangan. Kelebihannya adalah teori ini dapat menjelaskan variasi tingkat kriminalitas dan penyimpangan di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, seperti kelas, ras, etnis, gender, usia dan lainnya. Teori ini juga dapat menjelaskan perubahan tingkat kriminalitas dan penyimpangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kekurangan dari teori ini terlalu fokus pada aspek struktural dan mengabaikan aspek individual, seperti motivasi, kepribadian, sikap dan nilai-nilai. Teori ini juga terlalu menyederhanakan hubungan antara strain dan tindakan kriminal atau menyimpang, karena tidak semua orang yang mengalami strain akan melakukan tindakan tersebut, dan tidak semua tindakan tersebut disebabkan oleh *strain*.

Sebagai contoh, Merton menjelaskan bahwa banyak orang Amerika bermimpi menjadi kaya dan terkenal, tetapi hanya sedikit yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas, pekerjaan bergengsi, atau modal usaha. Oleh karena itu, beberapa orang memilih untuk melakukan inovasi, yaitu menerima tujuan-tujuan budaya tetapi menolak sarana-sarana struktural yang ada. Inovasi dapat berupa perilaku kriminal, seperti mencuri, menjual narkoba, atau melakukan korupsi.

Contoh lain dari inovasi adalah fenomena lotre atau judi *online*, yaitu cara-cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras atau berpendidikan tinggi. Meskipun peluang menang sangat kecil dan risiko kehilangan uang sangat besar, banyak orang yang tergoda untuk mencoba peruntungan mereka dengan berharap mendapatkan kekayaan instan.



Merton membagi lima jenis adaptasi terhadap anomie, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan. Konformitas adalah penerimaan terhadap tujuan-tujuan budaya dan sarana-sarana struktural yang ada. Inovasi adalah penerimaan terhadap tujuan-tujuan budaya tetapi penolakan terhadap sarana-sarana struktural yang ada. Ritualisme adalah penolakan terhadap tujuan-tujuan budaya tetapi penerimaan terhadap sarana-sarana struktural yang ada. Retretisme adalah penolakan terhadap tujuan-tujuan budaya dan sarana-sarana struktural yang ada. Pemberontakan adalah penggantian tujuan-tujuan budaya dan sarana-sarana struktural dengan yang baru.

Anomie adalah sebuah konsep yang penting untuk memahami fenomena-fenomena sosial seperti kriminalitas, bunuh diri, kemiskinan, revolusi, dan lain-lain. Anomie juga dapat digunakan untuk menganalisis kondisi-kondisi sosial yang dialami oleh individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dampak anomie bagi individu dan masyarakat meliputi (1). Menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi, (2). Meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan dan korupsi, (3). Meningkatnya angka bunuh diri, depresi dan gangguan moral, (4). Menurunnya rasa solidaritas, kepercayaan dan kerjasama sosial, (5). Menurunnya rasa tanggung jawab, kewajiban dan etika sosial, (6). Meningkatnya rasa ketidakpuasan, kekecewaan, ketidakadilan dan ketidakberdayaan, (7). Meningkatnya konflik, ketegangan dan perpecahan sosial.

Pertumbuhan Anomie di Indonesia

Pertumbuhan anomie di Indonesia tidak terlepas dari aspek historis dan perkembangan atau umumnya dinamika. Dari aspek historis, Indonesia dinilai mengalami loncatan besar pada perubahan sosial dan moderenitas, sebab pemerintah kolonial memperkenalkan sistem baru, baik menyangkut pemerintahan dan diluar pemerintahan. Setidaknya ada 5 (lima) negara yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda, Jepang, Inggris, Portugal dan Spanyol (sindonews.com). Dari aspek historis, penulis menilai bahwa anomie muncul karena dipengaruhi loncatan besar berupa transformasi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan sosial dan moderenitas dimungkinkan terjadi dengan sangat cepat, karena transformasi dilakukan untuk mendukung kepentingan dari pemerintah kolonial di Indonesia seperti sejumlah proses invasi diluar dari invasi politik, beberapa proses lain seperti adaptasi dan imitasi. Setiap pemerintah kolonial yang pernah menjajah di Indonesia, berkeinginan membangun *branding* yang mendukung kepentingan politik mereka.

Transformasi-transformasi yang dilakukan pemerintah kolonial di Indonesia dilakukan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru, baik untuk menerapkan sepenuhnya atau meng-embangkannya melalui proses adaptasi dan imitasi dengan sistem lokal. Transformasi tersebut dinilai sebagai salah satu dasar perubahan sosial dan moderenitas yang dipercepat oleh pemerintah kolonial, dan hal ini merupakan dasar untuk melihat awal mulanya embrio anomie muncul di Indonesia.

Percepatan perubahan sosial dan moderenitas masyarakat juga tak terlepas dari sejarah perkembangan internet di Indonesia. Diawali PT. Indosat, memperkenalkan internet pada tahun 1983 sebagai salah satu layanan telekomunikasi. Namun, awalnya internet hanya digunakan secara terbatas pada kalangan akademisi dan instansi



pemerintah saja (ub.ac.id). Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994 (gramedia.com). Internet mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an dengan sebutan “paguyuban network”, di mana semangat kerja sama, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat, dan terasa di antara para pelakunya (kemdikbud.go.id).

Sejarah internet di Indonesia diklaim berhubungan erat dengan kegiatan radio amatir yang dilakukan pada 1986-an oleh organisasi mahasiswa (ormawa) Amateur Radio Club (ARC) dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Aktivitas radio dari ITB tersebut menjadi cikal bakal perkembangan internet di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang. Demikian kutipan dari koran digital, Tirto (tirto.id).

Selanjutnya, tahun 1995, internet mulai diakses bebas masyarakat Indonesia. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk Internet Service Provider (ISP) yang diberikan kepada IndoNet dan Radnet. Beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa juga mulai menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri pada tahun yang sama. Dengan memakai remote browser Lynx di AS, maka pemakai Internet di Indonesia bisa akses Internet. Demikian kutipan bersumber dari ITB (kemdikbud.go.id).

Masih berkaitan perkembangan teknologi internet, eksistensi google tak terlepas dari percepatan perubahan sosial dan moderenitas masyarakat, dan bahkan eksistensya dinilai memperkuat dalam pengertian menyempurnakan perubahan sosial serta moderenitas masyarakat. Meskipun tidak ada kepastian kapan tepatnya masyarakat Indonesia mengakses google, namun mengingat bahwa google didirikan tahun 1998, maka dapat diasumsikan google dapat diakses masyarakat Indonesia tidak lama setelah didirikan, asalkan mereka memiliki akses internet. Pada pertengahan tahun 2012, Google secara resmi meluncurkan kantornya di Jakarta dengan tujuan untuk semakin meningkatkan seluruh ekosistem teknologi dan internet di Indonesia (markey.id).

Teknologi internet berkembang pesat dengan bermunculan tidak sedikit platform teknologi internet seperti teknologi media antara lain youtube dan facebook. Perkembangan teknologi internet di Indonesia, dinilai sebagai salah satu aspek penting dalam memperkuat dan menjamin percepatan perubahan sosial, serta moderenitas. Masyarakat Indonesia mulai mereduksi dan menyerap, serta mengembangkan hal yang diperoleh dari aktifitas mereka di internet. Mereka juga melakukan banyak penyesuaian dan belajar dari beragam sumber referensi di internet.

Peristiwa besar lainnya seperti euforia demokrasi yang muncul pada peristiwa pelengseran Presiden Soeharto, krisis moneter, politik identitas yang kuat dan hal tersebut dinilai mencuat di awal pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden, disusul ketidakpastian yang dimunculkan pandemic COVID-19, serta pemberlakukan kebijakan dan peraturan mencegah penyebaran virus corona di Indonesia juga tak terlepas dari ketegangan global antara Rusia dan Ukraina, membawa anomie lebih berkembang pesat di Indonesia.

Lebih lanjut, penulis dalam penelitian “Tentena Ceritamu Kini” (Tobondo, 2015), mengidentifikasi kemunculan anomie bersumber dari gesekan dalam kerapatan sosial sebagai hasil pertumbuhan kerapatan populasi yang mempengaruhi kerapatan

instrumen, kemudian mempengaruhi kerapatan moral. Setiap pertumbuhan dalam kerapatan sosial, berimplikasi pada ketidakseimbangan sistem dan struktur, baik menyangkut sosial, ekonomi dan budaya serta politik. Jika arahnya pada ketidakseimbangan, maka pertumbuhan anomie bersumber dari terbatasnya instrumen kebutuhan, sehingga keterbatasan itu berpengaruh pada terwujudnya moral seperti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, tugas dan kewajiban menjadi serba terbatas. Situasi dan kondisi serba terbatas tersebut, akhirnya menimbulkan reaksi berupa pandangan atas kemampuan negara, individu atau kelompok dalam mengatasi atau memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.

Kondisi ini dinilai menstimulus munculnya tindakan dan keputusan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas, kesehatan mental atau umumnya kehidupan masyarakat seperti beberapa aksi demonstrasi di Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kompas, menyebutkan bahwa Undang-undang Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai elemen, sebab Undang-undang ini hanya menguntungkan pengusaha dan asing, serta mengancam hak-hak buruh dan masyarakat adat. Aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah sejak Oktober 2020 (kompas.com).
2. BBC, menyebutkan demonstrasi yang dilakukan buruh, pedagang, mahasiswa dan aktivis lainnya bersumber dari ketidakpuasan penanganan kesehatan dan bantuan sosial oleh pemerintah (bbc.com).
3. Kompas, menyebutkan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPR RI pada April 2022 adalah reaksi penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau wacana penundaan Pemilu 2024, penolakan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh beberapa fraksi di DPR RI (kompas.com).

Berdasarkan penelitian terbaru dari Indonesian Association for Suicide Prevention (INASP), tingkat underreporting bunuh diri di Indonesia diperkirakan minimal 303%, jauh lebih tinggi dari rata-rata dunia yang dilaporkan sekitar 0-50% (inasp.com). Dengan demikian, jumlah kematian akibat bunuh diri yang disesuaikan pada tahun 2020 adalah minimal 2700, atau empat kali lipat dari data resmi. Jumlah ini masih bisa bertambah jika diperhitungkan faktor-faktor lain seperti metode bunuh diri yang tidak mematikan atau tidak memerlukan rawat inap.

Selain kematian akibat bunuh diri, ada juga upaya atau percobaan bunuh diri yang tidak berhasil. Menurut data INASP, pada tahun 2018 terdapat sekitar 6000 kasus percobaan bunuh diri di Indonesia. Namun, rasio antara upaya dan kematian akibat bunuh diri diperkirakan antara 4-12:1, artinya untuk setiap satu orang yang meninggal karena bunuh diri, ada empat hingga dua belas orang yang mencoba bunuh diri tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, jumlah percobaan bunuh diri yang disesuaikan pada tahun 2018 adalah antara 24300 hingga 72000.

Terdapat variasi geografis dalam tingkat bunuh diri di Indonesia. Berdasarkan data INASP, provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi pada tahun 2020 adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, provinsi dengan tingkat percobaan bunuh diri tertinggi pada tahun 2018 adalah Sulawesi Barat,



Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan spesifik provinsi dalam pencegahan bunuh diri, karena setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal agama, industri, geografi, dan etnis.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 27.589 kasus, dengan 25.050 korban perempuan (79,9 persen) dan 4.634 korban laki-laki (20,1 persen). Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.899 kasus (61,2 persen) terjadi di rumah tangga. Pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) mencapai 10.247 kasus, dengan 7.608 korban (74,2 persen) mengalami kekerasan di rumah tangga. Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui SIMFONI PPPA mencapai 18.142 kasus, dengan 12.397 korban (68,3 persen) mengalami kekerasan di rumah tangga (kompas.com, goodstats.id).

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus dan korban KDRT sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini sejalan dengan laporan Komnas Perempuan yang mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 mencapai 338.496 kasus, naik dari 226.062 pada tahun 2020 (kompas.com). Komnas Perempuan juga menyebut bahwa KDRT merupakan bentuk KBGTP yang paling banyak terjadi selama 17 tahun terakhir, yaitu sepanjang 2004-2021 dengan jumlah 544.452 kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Giddens., Anthony (1972). Emile Durkheim Selected Writings. United Kingdom: Cambridge University Press
- Tobondo., Adriani Galry Adoniram (2015). Tentena Ceritamu Kini Studi Hubungan Masyarakat Islam dan Kristen di Pasca Konflik Poso. Salatiga: UKSW Press
<https://repository.uksw.edu//handle/123456789/7057>